

## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

**Hendrik Toda**

Lecturer of Nusa Cendana University  
(Student of Doctoral Public Administration Science – Padjadjaran University)  
E-mail : [hendrik.toda2012@gmail.com](mailto:hendrik.toda2012@gmail.com)  
Hp.085234394506

### Abstract

*Poverty is a condition in which an individual or group of people under a decent standard of living due to the lack of fulfillment basic needs such food, clothing, shelter and drinking water, which affects the quality of life. According to data from the Central Bureau of Statistics East Nusa Tenggara (NTT) the number of the poor in NTT to November 2014 reached 991.880 thousand people of the total number of people in NTT are 5.356.67 people spread in 22 counties and cities. Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan has been done by the Local Government has entered the second period. Therefore, the government gives attention through flagship Programs Desa Mandiri Anggur Merah (DEMAM), which began in 2011-2015 for the NTT. Through this program is expected to bring changes to people's lives are scattered throughout the area in NTT. This program is intended for the 287 villages of a total of 2,837 villages in NTT meaning that every village received a grant of 250 million per village and then given to groups of small businesses that have signed up to be members of the cooperative, so it can be targeted. This research was conducted using qualitative descriptors. Through this program, the government can help poor communities in NTT to improve the quality of life as well as the response of the eraser head in the area of improving public services and improve the competitiveness of the region by maximizing the potentials that exist in the area for the public welfare.*

*Keyword : Competitiveness, East Nusa Tenggara, Poverty, The Strategy Poverty Reduction*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Tahun 2005, lahir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan (Pasal 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Penyebab kemiskinan menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki

sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitinya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Pada 2009 lahir Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Dalam beleid ini disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Pasal 2). Peraturan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada langkah ini tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Pada Perpres No. 15 Tahun 2010 ini, terdapat penekanan pada strategi percepatan

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (Pasal 3):

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 memiliki empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: Menyempurnakan program perlindungan sosial; Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster :

**Klaster I** : Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

**Klaster II** : Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

**Klaster III** : Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

**Klaster IV** : Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: *Pertama*, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang,

papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

## II. TEORI KEMISKINAN

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan

kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat berarti sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia.

Seperti diketahui, terdapat beberapa teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Teori-teori tersebut antara lain:

### (A) Teori Neo-Liberal dan Sosial Demokrat Mengenai Kemiskinan

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, the *Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang

mengedepankan azas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan mengusulkan "*the almost complete absence of state's intervention in the economy.*" Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara

langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker, 1995; Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program structural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

Tabel 2.1 Pandangan Neo-Liberal dan Sosial Demokrat terhadap Kemiskinan

	Neo-Liberal	Sosial Demokrat
Landasan teoritis	Individual	Struktural
Konsepsi dan indikator kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif; memberikan pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan	Penyaluran pendapatan dasar secara universal; perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara
Prinsip	Residual. Dukungan uang saling menguntungkan (mutual aid)	Institusional. Redistribusi pendapatan vertikal dan horizontal; aksi kolektif

Sumber, dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:176)

B. Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan,

kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak terjadi.

C. Teori Struktural

Teori ini didasari oleh pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank (1967), *Capitalism and the Underdevelopment in Latin America*, dan juga oleh Teotonio Dos Santos dan Samir. Teori struktural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan

ekonomi, melainkan politik-ekonomi Dunia.

**III. PEMBAHASAN**

**A. Data Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur**

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang termasuk kategori paling miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2014) merilis jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 991,88 ribu orang (19,60 persen) yang berkurang sekitar 28 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang berjumlah 994,68 ribu orang (19,82 persen). Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan

kenaikan harga BBM pada bulan November 2014. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2014-September 2014, penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 8,2 ribu orang (dari 894,33 ribu orang menjadi 886,18 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 5,4 ribu orang (dari 100,34 ribu orang menjadi 105,70 ribu orang). Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 22,15 persen pada Maret 2014 menjadi 21,78 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 10,23 persen, naik menjadi 10,68 persen pada September 2014.

Tabel 3.1 Garis kemiskinan dan Penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Garis Kemiskinan (rp/kap/bln)	Penduduk Miskin Jumlah (ribu penduduk)	Persentase
2010	193 298	1, 021	21,77
2011	198 553	986,5	20,48
2012	222 507	1 000	20,41
2013	251 080	1 007	20,24
2014	268 536	992	19,6

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2010 - 2014

Pada tahun 2013, NTT menjadi sasaran dari 4 program lembaga-lembaga bilateral, 15 program dari lembaga multilateral, 20 program dari

lembaga non-pemerintah. Total anggaran yang dikelola oleh lembaga-lembaga ini tidak kurang dari 233 miliar (Bapeda NTT, 2013). Pemerintah

sendiri juga melalui APBD menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk mengentas kemiskinan, salah satunya melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah, yang disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

Ada apa dengan NTT? Apakah kita memang telah digariskan untuk miskin sehingga program-program pembangunan yang digelontorkan tiap tahun, belum bisa mengeluarkan daerah ini dari jerat kemiskinan? Kalau memang NTT memiliki banyak 'kapital', mengapa orang NTT menjadi miskin dan bagaimana mereka menjadi miskin serta tetap miskin bahkan semakin miskin? Ada dua Faktor utama yaitu:

1. Budaya adat istiadat yang di pegang selama turun temurun melalui perkawinan, kematian dan penyambutan tamu maka kebiasaan banyak hewan yang di potong sebagai tradisi (prestisi) atau menjaga nama baik pribadi bahkan keluarga besar tanpa memperhatikan dampak negatif setelah itu. Faktor budaya menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sudah dianggap

sebagai tradisi yang melekat di NTT yang selama bertahun-tahun di lakukan penduduk NTT, kurangnya memperhatikan terhadap pendidikan anak terjadi hampir di daerah-daerah di NTT anggapan bahwa pesta pora lebih mengangakat nama baik keluarga dibandingkan mempersiapkan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kebiasaan adat istiadat tersebut membawa dampak kemiskinan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan setiap perubahan di masyarakat Lende Wara dan Purwiyastuti (2009)

2. Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : sumber daya alam yang terbatas dan kondisi geografis yang rawan bencana, curah hujan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas serta kesenjangan alokasi pembangunan antar Daerah di Indonesia. Krisis multi dimensional dan berbagai

kebijakan Pemerintah yang kurang pro rakyat miskin menyebabkan Nusa Tenggara Timur semakin sulit untuk menggeliat dari kemiskinan yang membelenggunya. (*Posted by oceannaz* in Kebijakan, Kemiskinan, Masyarakat, Mengintip Jendela Instansi Pemerintah, Pemberdayaan 2008)

## **B. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan**

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut **Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29)** yaitu :

1. Pendidikan yang Terlampaui Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan

yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

#### 6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

**Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006:4)** mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu : (1) Rendahnya Taraf Pendidikan Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi

kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. (2)

Rendahnya Derajat Kesehatan Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. (3)

Terbatasnya Lapangan Kerja Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. (4)

Kondisi Keterisolasian Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan strategi atau pendekatan yang tepat agar setiap program dapat berjalan dengan efektif menurut Soegijoko(1997).

1. Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus berpihak kepada orang miskin.
2. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk

memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian

### **C. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia secara geografis berdekatan dengan Negara Timor Leste dan Australia. NTT merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 21 kabupaten dan kota. Di mata bangsa kita bahkan

negara-negara tetangga NTT merupakan provinsi yang tertinggal dan miskin bahkan sering kita jumpai di media massa lokal maupun internasional menyoroti kehidupan kemiskinan di NTT mulai dari ketersediaan beras, ketersediaan air bersih, pendidikan maupun tempat tinggal yang kurang layak. Fenomena ini menjadi biasa dihadapi oleh masyarakat kita karena berbagai faktor penyebab, di lain sisi NTT timur sangat kaya akan potensi sumber daya alam yang banyak mulai dari perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, kebudayaan bahkan pertanian. Oleh karena itu perlunya langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk membawa masyarakat miskin keluar dari belenggu kemiskinan. Menurut Craig & Grant (1996) mengungkapkan bahwa strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*). Bahkan perencanaan strategi menurut Anthony dan Govindarajan (1995) merupakan suatu proses manajemen

yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang.

Merujuk beberapa pendapat di atas maka strategi merupakan penetapan sasaran melalui program-program unggulan yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui,

1. Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 – 2013, program ini tentunya sudah berjalan 5 tahun program Desa Mandiri Anggur Merah atau biasanya disebut DEMAM, diperuntukan bagi 287 desa dari total 2.837 desa yang ada di NTT untuk setiap desa di alokasikan sebesar Rp.250 juta dengan Mekanisme pemberian dana menggunakan pendekatan kelompok masyarakat (*community*

*base group*). Masyarakat menghimpun diri dalam kelompok-kelompok usaha, dan program ini di akui berhasil membangun perekonomian masyarakat miskin yang ada di desa-desa di NTT

2. Memberikan pinjaman lunak dengan bunga yang rendah bagi pelaku usaha masyarakat NTT di khususkan kepada petani, nelayan, peternak bahkan usaha kecil menengah yang sedang mengembangkan usaha mereka. Pinjaman dimaksudkan agar kelompok-kelompok usaha saling berkompetisi untuk memajukan usaha mereka yang akan disesuaikan dengan jenis usaha apa yang akan mereka kerjakan. Menurut Winter Marbun Kepala Otoritas Jasa Keuangan kupang, Nusa Tenggara Timur menyebutkan penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) terbanyak dinikmati oleh usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dengan nilai Rp. 25 juta ke bawah, sebanyak 70% penyaluran dana kredit di NTT paling banyak ke usaha mikro. Menurut Winter,

ada lima bank yang dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan dana KUR di NTT. Penyaluran KUR hingga Maret 2016 telah mencapai 1,6 Triliun dari target 120 Triliun untuk Tahun 2016. Tentunya ada beberapa permasalahan dalam program ini karena minimnya penyaluran KUR di NTT karena belum tersentuh ke pelosok desa, oleh karena itu perlu dibentuk tim dari masing-masing daerah agar masyarakat terpencil mendapat akses lembaga keuangan, dan tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan kredit macet sehingga dana bantuan pemerintah daerah serta pemerintah pusat melalui APBN dapat tepat sasaran ( OJK, 2016).

3. Memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat sehingga mereka fokus terhadap usaha yang mereka kerjakan dengan menyiapkan mitra kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi sebagai fasilitator guna dapat memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat, dan pelatihan ini

dimaksudkan agar setiap dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah melalui program Anggur Merah (Demam) dan KUR dapat berjalan dengan efektif. Pelatihan kewirausaha sudah berjalan melalui Lembaga pengabdian Masyarakat (LPM Undana), yang secara berkelanjutan terus memberikan pelatihan kepada masyarakat di NTT

#### 4. Meningkatkan daya saing daerah

Investasi yang masuk dalam suatu daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dengan begitu maka dapat mengatasi pengangguran penduduk. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Jika melihat pendapat Abdullah dkk (2002) daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk menggapai suatu pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan tanpa menutup pintu persaingan domestik maupun internasional.

Pentingnya daya saing daerah guna kemakmuran masyarakat NTT dengan cara setiap kepala daerah merespon dan memperhatikan potensi daerahnya yang menjadi andalan yang selama ini belum dikelola secara maksimal, misalnya pada beberapa kabupaten mulai mengembangkan potensi daerah diantaranya,

- a. Kabupaten Ende terdapat danau 3 (tiga) warna atau yang disebut dengan danau kelimutu, yang sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional, perlu dikelola secara maksimal dengan memperbaiki akses jalan, transportasi bahkan hotel, sehingga memudahkan wisatawan berkunjung ke kabupaten Ende.
- b. Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo) terdapat Taman Nasional Komodo yang merupakan satu-satunya di dunia yang kalau dikelola dengan baik maka akan mendatangkan pemasukan yang besar bagi daerah, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di NTT seberapa besar keseriusan mereka menangkap peluang. Dimana

setiap daerah daerah di indonesia berloma-lomba memajukan pariwisata mereka sebagai sumber pemasukan daerah.

- c. Sumba Barat terdapat Pantai Nihiwatu yang masuk 20 pantai terbaik di dunia, berada di urutan 17 terbaik dunia oelh karena itu pemerintah daerah harus terus mempromosikan potensi tersebut sehingga dapat menarik investor guna bekerjasama menata wisatasuba barat dengan demikian dapat menarik wisatawan domestik dan internasional untuk berkunjung ke sumba barat
- d. Seluruh kabupaten dan kota di NTT mempunyai kekhasan dari motif kain tenunan yang menjadi ciri khas tiap daerah yang sudah di akui secara nasional maupun internasional. Jika pemerintah daerah mempunyai perhatian lebih terhadap para pengrajin atau penenun di kabupaten-kabupaten kota yang ada di NTT dengan memberikan bantuan modal, pelatihan, mencari akses keluar lewat promosi yang dimaksudkan dapat dipasarkan setelah proses menjadi kain tenun yang dapat di

jual, dengan demikian akan berdampak pada perekonomian daerah, tentunya masyarakatlah yang akan merasakan dampak positif melalui perbaikan ekonomi keluarga. Inilah yang menjadi modal dan aset daerah salah satu aspek yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan pengrajin NTT.

#### **D. PENUTUP**

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, di Nusa Tenggara Timur sendiri kemiskinan menjadi persoalan yang sangat rumit untuk diatasi, berbagai faktor sudah dijelaskan diatas bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya masyarakat memahami dampak dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang suka pesta pora pada setiap prosesi adat istiadat, baik kematian, perkawinan dan penyambutan tamu, dan ini terjadi hampir diseluruh kabupaten yang ada di NTT. Bahkan setiap aturan yang dibuat oleh kepala daerah seringkali dilanggar sendiri oleh para pimpinan sebagai contoh dibuat Perda (Peraturan Daerah) agar setiap

prosesi apapun tidak boleh memotong hewan berlebihan akan tetapi hal ini dilanggar oleh pembuat aturan ketika terjadi kematian atau perkawinan para pejabatlah yang banyak memotong hewan sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Dengan hadirnya program Demam (Desa Mandiri Anggur Merah) memberi dampak perubahan signifikan selama beberapa tahun ini dengan banyak masyarakat di NTT mulai sadar akan pentingnya bantuan pemerintah Provinsi NTT dalam menyalurkan bantuan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan pendampingan yang terus berkelanjutan melalui berbagai pelatihan kewirausahaan oleh pemerintah dapat mendorong semangat masyarakat NTT saling berkompetisi

secara sehat dalam memajukan usaha mereka.

Perlunya upaya penanggulangan kemiskinan dapat juga dilakukan dengan memperbaiki setiap aspek pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan investor sehingga ada sinergi saling kebergantungan dimana masyarakat membutuhkan pekerjaan yang tidak semua dapat disediakan oleh pemerintah tetapi dapat di akomodir oleh swasta atau investor. Langkah pemerintah adalah memudahkan perijinan kepada investor yang akan berinvestasi di NTT sehingga dapat membuat mereka merasa aman. Rasa aman akan berinvestasi tentunya jika prosedur dan biaya-biaya yang dikeluarkan tidak memberatkan investor. Akan menjadi tantangan tersendiri kepada kabupaten-kabupaten kota yang ada di NTT apabila tidak merespon daya saing daerah dengan memaksimalkan potensi daerah yang menjadi andalan daerah. Oleh karena itu semangat daya saing daerah akan nyata apabila setiap kepala daerah memiliki visi dan semangat yang kuat membangun daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan dengan

sendirinya akan mengurangi kemiskinan di NTT.

### Daftar Pustaka

- Abdullah,P, dkk, (2002). *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta
- Anthony, R.N. dan V.Govindarajan. 1995. *Management Control System*. Eight Edition International Student Edition. Richard D. Irwin Inc. U.S.A.
- Craig & Grant. (1996). Siagian. (2004). Johnson and Scholes Kotler. (2001). Stanton. (2001). *Pengertian Strategi Pemasaran*
- Cahyat (2004), *Bagaimana Kemiskinan diukur Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia*. Poverty dan Decentralization Project CIFOR (Center For International Forestry Research) BMZ. November 2014
- Cheyne, Christine, Mike O'Brien dan Michael Belgrave (1998), *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical*

- Introduction*, Auckland: Oxford University Press.
- Christian Mbui 28 April 2015**  
Kemiskinan di NTT: *Telaah dan Strategi Penanggulangan studi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Fakultas Ekonomi, Studi Keuangan dan Perbankan*
- Dadan Hudaya, 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. (Skripsi). Institut Pertanian, Bogor.
- Frank, Gunder, Andre, (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Irvan Kurniawan 7 Juli 2015**  
*Mengapa NTT Kita Masih Miskin Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang.*
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta
- Lewis, Oscar. 1966. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan (ed.), kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rahmawati, Y. I. 2006. *Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Shannon, M.C. 1993. *Adaptation of Plan Salinity. Advance in Agronomy*. Delaware Academic Press. San Diego.